

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik manajemen laba, pada dasarnya, terjadi sebagai akibat kurang efektifnya penerapan *good corporate governance*. *Good corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang, kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan tata suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007).

Hubungan antara mekanisme *corporate governance* dengan manajemen laba, baik di Indonesia maupun di luar negeri telah dibuktikan oleh beberapa penelitian. Menurut Jensen (1993) hipotesis pemusatan kepentingan menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer.

Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. Pemusatan kepentingan dapat dicapai dengan memberikan kepemilikan saham kepada manajer. Jika manajer memiliki saham perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik. Jika kepentingan manajer dan pemilik sejajar (*aligned*) dapat

mengurangi konflik keagenan. Jika konflik keagenan dapat dikurangi, manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi hambatan kontraktual. Tetapi tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi dapat menimbulkan masalah pertahanan. Artinya jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka memiliki posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan dan pihak eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. hal ini disebabkan karena manajer mempunyai hak *voting* yang besar atas kepemilikan manajerial yang tinggi.

Nasution dan Setiawan (2007) melakukan penelitian terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, serta keberadaan komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Nofiani (2008) yang menunjukkan bahwa komite audit dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Ujiyantho dan Pramuka (2007) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan manajerial dan keberadaan komisaris independen terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian Veronica dan Utama (2006) menunjukkan bahwa komponen *corporate governance* (kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, keberadaan komite audit) dan rasio hutang berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba; sedangkan kepemilikan keluarga dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen

laba. Sefiana (2008) dalam penelitiannya membuktikan bahwa proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Roodposhti dan Chashmi (2011) menemukan *board independence* berhubungan negatif dengan manajemen laba. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa investor institusional memiliki hubungan negatif terkait dengan manajemen laba. Perusahaan dengan kepemilikan institusi lebih tinggi memiliki akrual diskresioner yang lebih tinggi. Investor institusional tidak dapat memantau manajer efektif dalam hal kualitas akrual, dan investor institusi tidak dapat mengembangkan tata kelola perusahaan dan membantu dalam mencegah *board management* perusahaan laba. Abed, Attar dan Suwaidan (2012) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi adalah satu-satunya variabel yang memiliki hubungan yang signifikan dengan manajemen laba.

Mekanisme *corporate governance* yang baik akan mengurangi tindakan manajemen laba (Watfield *et al.* (1995), Gabrielsen *et al.* (1997), Wedari (2004), Midiastuty dan Machfoedz (2003). Watts (2003) menyatakan bahwa salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen adalah *good corporate governance*. Jensen (1993) menjelaskan bahwa melalui penerapan *good corporate governance*, diharapkan dapat mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan manipulasi oleh manajer. Sehingga kinerja yang dilaporkan merefleksikan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan yang bersangkutan.

Setelah dapat dilakukan identifikasi adanya praktik manajemen laba pada perusahaan go publik di Indonesia yang tergabung dalam indeks konvensional, dan dapat ditentukan model pengukuran manajemen laba yang sesuai, maka perlu adanya upaya melakukan penilaian efektifitas implementasi model tersebut melalui mekanisme *corporate governance*.

Dengan menilai peran mekanisme *corporate governance* dalam mengurangi tindakan manajemen laba maka dapat diukur efektifitas implementasi model manajemen laba yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian Watfield et al. (1995), Gabrielsen et al. (1997), Wedari (2004), Midiastuty dan Machfoedz (2003). Watts (2003) menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang baik akan mengurangi perilaku *opportunistic* manajemen. Jensen (1993) menjelaskan bahwa melalui penerapan *good corporate governance*, diharapkan dapat mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan manipulasi oleh manajer sehingga kinerja yang dilaporkan merefleksikan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan berjudul:

“Analisis Mekanisme *Corporate Governance* Dan Manajemen Laba Pada Perusahaan Go Publik Yang Terdaftar Pada Index LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah

1. Apakah mekanisme *corporate governance* yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan keberadaan komite audit efektif dapat mengurangi tindakan manajemen laba dengan pendekatan *long term discretionary accrual* pada perusahaan go publik yang terdaftar pada indeks LQ-45?.
2. Apakah mekanisme *corporate governance* yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan keberadaan komite audit efektif dapat mengurangi tindakan manajemen laba dengan pendekatan *short term discretionary accrual* pada perusahaan go publik yang terdaftar pada indeks LQ-45?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan keberadaan komite audit efektif dapat mengurangi tindakan manajemen laba dengan pendekatan *long term discretionary accrual* pada perusahaan go publik yang terdaftar pada indeks LQ-45.
2. Untuk menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan keberadaan komite audit efektif dapat mengurangi tindakan manajemen laba dengan

pendekatan *short term discretionary accrual* pada perusahaan go publik yang terdaftar pada indeks LQ-45

Manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Dapat memberikan kontribusi kepada para investor dalam memberikan bukti empiris mengenai bagaimana implementasi model manajemen laba dan sejauhmana peran *corporate governance* terhadap praktek manajemen laba dengan pendekatan *long term discretionary accrual* dan *short term discretionary accrual* di Indonesia. Hal ini dapat memberikan referensi dalam pembuatan keputusan untuk memilih perusahaan dalam berinvestasi.
2. Secara metodologi, hasil penelitian ini diharapkan memberikan pijakan bagi penelitian mendatang terkait dengan mekanisme *corporate governance* yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit dalam praktik manajemen laba sehingga dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi perusahaan di Indonesia.